

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Munculnya paradigma pemberian otonomi pendidikan kepada sekolah yaitu lahir dari pemikiran bahwa kepala sekolah paling memahami permasalahan di sekolahnya. Karena itu, sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terkait dengan hal sekolah harus memiliki wewenang, tidak

saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah termasuk mengelola keuangan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi stakeholder pendidikan sesuai dengan payung kebijakan makro pendidikan nasional.

Jika dicermati bahwa paradigma pengelolaan keuangan sekolah dalam kerangka otonomi sekolah sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan sebelum kebijakan ini diluncurkan. Jika sebelumnya segala pengelolaan keuangan sekolah lebih merupakan hak otoritas sekolah. Namun adanya kebijakan otonomi sekolah, arah kebijakan tersebut dirubah dengan menjadikan orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah sebagai mitra yang harus dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan pengelolaan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan keuangan yang seperti ini harus menumbuhkan partisipasi kolektif dari segenap stakeholder pendidikan yang ada disekolah karena semuanya dilibatkan dalam proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.

Salah satu dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah adalah dana BOS. Dana BOS lahir dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta membantu jangkauan layanan pendidikan kepada keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kekurangan dana. Data Depdiknas tahun 2004 yang mendorong lahirnya kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu karena pada saat itu menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat

mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya peraktek, penyediaan sarana pembelajaran, perawatan ringan serta biaya untuk meningkatkan mutu guru.

Untuk dapat mengelola dana BOS secara partisipatif maka perlu usaha proaktif dari sekolah untuk melibatkan komite sekolah sehingga segala hal yang terkait dengan pengelolaan dana diketahui secara terbuka oleh semua pihak. Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS antara lain ditunjukkan dengan adanya partisipasi komite sekolah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam konteks ini sekolah harus melibatkan segenap potensi guru dan seluruh masyarakat pendidikan untuk memberikan saran dalam penyusunan RAPBS. Perlunya pelibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS yaitu agar semua komponen pendidikan di sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan serta mengontrol aplikasi dari rencana yang telah disusun bersama. Sebagai bentuk dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyusunan RAPBS maka RAPBS tersebut harus dipajangkan sehingga setiap warga sekolah dapat melihat secara langsung rencana yang telah disusun bersama tersebut.

Pada tataran pelaksanaan pembelanjaan dana BOS, Kepala Sekolah serta Bendahara BOS harus selalu mengkoordinasikan semua kegiatan pembelanjaan atau pengeluaran dana BOS. Pada tahap ini perlu dijelaskan secara terbuka

mekanisme pembelanjaan serta pengeluaran keuangan. Dengan demikian komite sekolah dapat memberikan masukan atau pertimbangan jika terdapat pembelanjaan atau pengeluaran dana yang kurang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini merupakan bentuk kontrol atau pengawasan yang efektif dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan dana BOS.

Selanjutnya untuk lebih mendukung tingkat partisipasi dalam rencana penyusunan pengelolaan dana BOS maka perlu dilakukan pula kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS. Kegiatan evaluasi dilakukan juga perlu melibatkan partisipasi komite sekolah. Setiap temuan dalam kegiatan evaluasi perlu dikomunikasikan kepada komite sekolah sehingga dapat diketahui secara pasti pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah. Evaluasi ini pula akan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan dana BOS serta menjadi bahan komparasi untuk pengelolaan dana BOS selanjutnya.

Mencermati uraian diatas jelas bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan dana BOS ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain adanya peran aktif komite sekolah dalam penyusunan dan evaluasi pemanfaatan dana BOS. Melalui pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif komite sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di sekolah.

SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS dan harus berusaha secara maksimal untuk memanfaatkan dana BOS secara maksimal sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Depdiknas. Kondisi yang ada di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa menunjukkan bahwa dana

BOS yang telah diterima oleh sekolah tersebut telah dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa serta telah digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik.

Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa keterlibatan dari stakeholder pendidikan yang lain di sekolah diantaranya orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah belum maksimal. Realita yang teramati menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS belum melibatkan secara maksimal partisipasi komite sekolah baik dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan pemanfaatan dana BOS. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa penyusunan RAPBS hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara. Tingkat keterlibatan komite sekolah masih kurang. Dalam kegiatan pembelanjaan dana BOS dilakukan tanpa mengkoordinasikan prosedur dalam pengeluaran atau pembelanjaan dana BOS. Mencermati realitas tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan memformulasikan dalam satu judul **“Partisipasi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian yang telah di uraikan di atas, maka ada fokus masalah yang menjadi pertanyaan peneliti adalah :

1. Partisipasi komite sekolah dalam perencanaan pengelolaan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.
2. Partisipasi komite sekolah dalam pengorganisasian pengelolaan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.

3. Partisipasi komite sekolah dalam pengkoordinasian pengelolaan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.
4. Partisipasi komite sekolah dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi komite sekolah dalam perencanaan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.
2. Untuk mengetahui partisipasi komite sekolah dalam pengorganisasian dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.
3. Untuk mengetahui partisipasi komite sekolah dalam pengkoordinasian dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.
4. Untuk mengetahui partisipasi komite sekolah dalam pengawasan dana BOS di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi dan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Kelemahan-kelemahan maupun keunggulan-

keunggulan yang diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini diharapkan sebagai arah untuk membantu baik kepala sekolah, guru, dan komite sekolah di SDN 1 Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tercapainya tujuan pengelolaan dana BOS dimasa yang akan datang.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap sekolah – sekolah dasar dan pihak komite sekolah tentang partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS guna meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri yang akan datang dan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan untuk melakukan penelitian lanjutan sebagai perbandingan dalam penelitian sejenis.